

**KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR : KEP-117/PW23/1/2017**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS), PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PENGELOLA  
WEBSITE/TEKNOLOGI INFORMASI  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

- Menimbang** : a. bahwa hak dan keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disuarakan oleh mass media, perlu mendapat perhatian yang wajar oleh Pimpinan BPKP guna menjaga keseimbangan informasi yang beredar di masyarakat;
- b. bahwa untuk mendukung penyediaan informasi yang dimaksud pada huruf a perlu pemanfaatan jaringan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini;
- c. bahwa adanya pengangkatan dan mutasi pejabat struktural di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Pembentukan Anggota Sekretariat Hubungan Masyarakat (Humas), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pengelola Website / Teknologi Informasi Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005;

3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tersebut telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016;
4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP 653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Anggota Sekretariat Hubungan Masyarakat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Website/Teknologi Informasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEDUA** : Sekretariat Humas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pengelola Website/Teknologi Informasi tersebut bertugas untuk membantu Kepala Perwakilan dalam pelayanan informasi yang akurat pada masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sekretariat Humas Daerah dibebankan kepada anggaran Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2017

Asli petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
pada Tanggal : 12 Oktober 2017





LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA  
BARAT  
Nomor : KEP-117/PW23/1/2017  
Tanggal : 12 Oktober 2017

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT HUMAS  
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Sekretariat Humas
1	2	3	4
1	Ayi Riyanto	Kepala Perwakilan	Pejabat Kehumasan Daerah selaku <i>Liaison Officer</i>
2	Tri Wibowo Aji	Koordinator Pengawasan Bidang Prolap dan APIP	Narasumber
3	Ngatno	Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	Narasumber
4	Bagus Santika	Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	Narasumber
5	Teguh Prihandono	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Narasumber
6	Puguh	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Narasumber
7	Ence Supriatna	Kepala Bagian Tata Usaha	Narasumber

KEPALA PERWAKILAN  
  
AYI RIYANTO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN  
 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN  
 PEMBANGUNAN PROVINSI NUSA TENGGARA  
 BARAT  
 Nomor : KEP-117/PW23/1/2017  
 Tanggal : 12 Oktober 2017

---

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam PPID
1	2	3	4
1	Ayi Riyanto	Kepala Perwakilan	Penanggung Jawab
2	Bagus Santika	Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat	Narasumber
3	Teguh Prihandono	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Narasumber
4	Puguh	Koordinator Pengawasan Bidang Akuntan Negara	Narasumber
5	Ngatno	Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
6	Tri Wibowo Aji	Koordinator Pengawasan Bidang Prolap dan APIP	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Ence Supriatna	Kepala Bagian Tata Usaha	Kepala Sekretariat merangkap Pengelola Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Informasi
9	Setyo Basuki	Dalnis Investigasi	Sekretariat Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
10	Franciscus Hary Pitrajuwanto	Dalnis APD	Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi
11	Irwan Supriyadi	Kepala Sub Bagian Umum	Sekretariat Pengelola Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Informasi
12	Rikky Widyartanto	Auditor Pelaksana Lanjutan	Staf Sekretariat Pengelola Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa/ Pengelola Kehumasan Bidang Investigasi

13	Vimbyarno Purbo Suseno	Auditor Pertama	Staf Sekretariat Pengelola Pelayanan Informasi/ Pengelola Kehumasan Bidang P3A
14	Adithia Ramadhan	Auditor Pertama	Staf Pengelola Website/ Pengelola Kehumasan Bidang IPP
15	Arsy Fajriar	Auditor Pertama	Staf Pengelola Dokumentasi/ Pengelola Kehumasan Bidang APD
16	Mandala Ulil Amri	Auditor Pertama	Staf Pengelola Kehumasan Bidang Akuntan Negara
17	Dwi Rahnyo	Pengelola Pelaksanaan PBJ	Staf Pengelola Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan Informasi
18	Munarso	Pengadministrasi Umum Tk. I	Staf Pelayanan Informasi/ Pengelola Kehumasan Bagian Tata Usaha
19	Eko Wardoyo	Pengelola SAI Tingkat II	Staf Pengelola Dokumentasi

KEPALA PERWAKILAN



AYI RIYANTO